



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara, diperlukan langkah-langkah untuk percepatan pembangunan industri perikanan nasional sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
- (2) Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional merupakan program Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk periode Tahun 2016-2019.

(3) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Rencana Aksi tersebut terdiri dari:
 - a) Program;
 - b) Kegiatan;
 - c) Target/ *Output*;
 - d) Jangka Waktu;
 - e) Penanggung Jawab; dan
 - f) Instansi Terkait.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi:

- a. Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
- b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait Pembangunan Industri Perikanan.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Pasal 5

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
1.	Perikanan Tangkap Berkelanjutan	Revitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal ikan buatan lokal	PP tentang Kapal Perikanan	x	x			KKP	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Peningkatan kapasitas produksi perikanan Tangkap melalui 4.787 unit kapal < 30 GT Bantuan Pemerintah dan 12.536 unit kapal > 30 GT swasta nasional	x	x	x	x	KKP	Kemenhub, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Galangan Kapal
			Klasifikasi dan sertifikasi 50 galangan kapal skala menengah ke bawah (non baja)		x	x	x	Kemenperin	BKI, Kemen BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
			Standardisasi dan sertifikasi 5 komponen	x	x			Kemenperin	BKI, KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			kapal						
			Peningkatan TKDN untuk komponen pembuatan kapal	x	x			Kemenperin	Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendag
		Penegakan hukum & transparansi perizinan untuk mencegah <i>IUU Fishing</i>	PP tentang Pengawasan Perikanan	x	x			Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)	Kemenkumham, KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung (Kejagung)
			Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan	x				KKP	Kemenkumham, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah Daerah (Pemda)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia						
			Gerei Pelayanan Perizinan Terpadu di 31 Lokasi dan Data sharing 34 provinsi	x	x			KKP	Kemenhub, Pemda
		Melengkapi sarana & prasarana Pelabuhan Perikanan	Pemenuhan standar operasional bagi 13 lokasi pelabuhan perikanan	x	x	x	x	KKP	Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Pemda
			Sarana dan prasarana air bersih di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen PUPR	KKP
			Sarana dan prasarana pendukung pelabuhan di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen PUPR	KKP
			Pengerukan alur 6 lokasi	x	x	x	x	Kemenhub	KKP, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			pelabuhan perikanan						
			Sarana dan prasarana akses jalan dari dan ke sentra produksi di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen PUPR	Pemda
			Perumahan nelayan di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen PUPR	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemda
			Data dan informasi kinerja pelabuhan tangkahan di 34 provinsi	x	x	x	x	Kemenhub	KKP, Kemenkeu, TNI, Polri, Pemda
			Fasilitas bongkar muat ikan di 10 lokasi Pelabuhan Umum	x	x	x	x	Kemenhub	KKP, Kemenkeu, Pemda
		Memenuhi kebutuhan energi untuk armada	Stasiun Pengisian BBM di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen ESDM	KKP, Pertamina, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		kapal ikan domestik	Paket percontohan 8.000 LPG dan konverter kit	x	x			Kemen ESDM	KKP, Pertamina Kemenperin, Pemda
		Melatih keterampilan dan melakukan sertifikasi nelayan	Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada 1.200 unit kapal, sertifikasi penangkapan bagi 9.659 orang dan sertifikasi keterampilan penanganan ikan bagi 6.440 orang	x	x	x	x	KKP	Kemenhub, Pemda
2.	Perikanan Budidaya Berkelanjutan	Mengurangi biaya pakan dalam komponen produksi budidaya	Revisi PMK Nomor 267/PMK.010/205 tentang kriteria dan/ atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/ atau penyerahannya	x				Kemenkeu	Kemendag, Kemenperin, KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			dibebaskan dari PPN						
			Pengendalian ekspor dan impor bahan baku pakan dan inisiasi pembangunan pabrik pakan dan pembenihan ikan oleh BUMN	x	x	x	x	Kemen BUMN	KKP, Kemenkeu, Kemendag
			Perpres tentang PSO untuk pakan dan benih ikan	x	x			Kemenkeu dan Kemen BUMN	KKP
		Melengkapi sarana & prasarana untuk peningkatan produksi tambak	Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, terkait dengan usulan memasukkan sistem	x				Kemen PUPR	Kemenkumham



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			irigasi untuk perikanan budidaya						
			Pembangunan jaringan irigasi, jalan produksi, pengolahan limbah dan sabuk hijau untuk menunjang produksi perikanan budidaya di 12 provinsi	x	x	x	x	Kemen PUPR	KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Pemda
			Pemenuhan pasokan energi listrik usaha budidaya tambak udang	x	x	x	x	Kemen ESDM	KKP, Kemen BUMN, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemda
			Penyediaan kincir, pompa, genset, eskavator, dan plastik geomembran/HDPE		x	x	x	KKP	Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			untuk tambak						
		Membangun kemitraan bisnis dengan pembudidaya skala UKM	Permen KP tentang Usaha Perikanan Budidaya	x				KKP	Kemenkumham, BKPM, Pemda
			Permen KP Kemitraan Bidang Perikanan Budidaya (penanaman modal asing)	x				KKP	Kemenkumham, BKPM, Pemda
			Permen KP Kemitraan Bidang Perikanan Budidaya (inti plasma)/ Penggalangan Dana Masyarakat	x				KKP	Kemenkumham, Pemda, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kemenkop, Pemda
			Sistem on line BKPM - PTSP daerah	x	x			BKPM	KKP, Kemenperin, Kemendag, Pemda
		Melatih keterampilan & sertifikasi pembudidaya	PP tentang Pembudidaya Ikan	x	x			KKP	Kemenkumham, Kementerian Pertanian (Kementan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	x	x	x	x	KKP	Pemda
3.	Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Akses listrik dan rantai dingin untuk bahan baku industri perikanan	Revisi Permen ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. PLN terkait dengan pengecualian tarif dasar listrik saat beban puncak pada industri perikanan	x				Kemen ESDM	Kemenkeu
			Permen KP tentang Pengendalian Pengeluaran Bahan Baku Utuh Segar dan Beku Komoditas Industri ke Luar Wilayah NKRI	x				KKP	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, Kemenkumham



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Sistem rantai dingin di 31 SKPT dan sentra produksi perikanan/pengumpulan/pusat distribusi (pemerintah dan swasta)	x	x	x	x	KKP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Kemen PUPR, Kemenperin, Pemda
			Pemenuhan pasokan energi listrik untuk sistem rantai dingin di 31 lokasi prioritas industri perikanan	x	x	x	x	Kemen ESDM	KKP, Kemen BUMN, PLN, Pemda
		Kemudahan akses transportasi, ekspor & impor untuk industri perikanan	Kesepakatan Bersama Menhub-Mendag-MenKP-MenBUMN tentang optimalisasi pengangkutan ikan sebagai muatan angkutan balik kapal Trayek Tol Laut, terutama untuk produk	x	x			Kemendag	Kemenkomar, Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, Badan Informasi Geospasial (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			hasil perikanan						
			Penambahan jumlah pelabuhan ekspor hasil perikanan melalui penetapan bandara dan pelabuhan laut untuk ekspor di 20 SKPT	x	x			Kemenhub	Kemenkeu, Kemendag, Imigrasi, KKP
			Perpres tentang PSO untuk jasa angkutan produk KP antar pulau, termasuk dari pulau-pulau terluar	x	x			Kemenkeu/ Kemen BUMN	Kemenhub
			Pengendalian produk perikanan di exit entry point dan daerah perbatasan di 18 Bandara, 7 Pelabuhan Laut Utama & 12 Pos	x	x	x	x	KKP	Kemen PUPR, Kemenkeu, Kemenhub, Kemen BUMN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Lintas Batas						(BNPP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
		Kemudahan akses tenaga kerja terampil untuk industri perikanan	Reviu Kep. Menakertrans No.: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terkait dengan reviu definisi tenaga kerja inti dan pendukung bidang perikanan	x				Kemenaker	KKP
			Sertifikasi petugas mutu	x	x	x	x	KKP	Kemenhub, Pemda
			Pembentukan LSPro (Lembaga Sertifikasi Profesi)		x	x	x	KKP	Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Fasilitas perpajakan dan tarif impor & ekspor untuk Industri perikanan	Revisi Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terkait dengan pengecualian PPnBM peralatan sarana sistem rantai dingin	x				Kemenkeu	KKP, Kemendag
			Revisi Permen Keuangan No 124 Tahun 2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib	x				Kemenkeu	KKP, Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Pajak Industri Tertentu, terkait dengan usulan memasukkan industri perikanan ke dalam industri padat karya yang mendapat fasilitas pengurangan PPh						
			Penetapan pengenaan pajak ekspor bahan baku mentah	x	x			Kemenkeu	KKP, Kemendag, Perindustrian
			Penurunan tarif dan atau non tarif komoditas utama di negara tujuan ekspor (UE dan AS)	x	x	x	x	Kemendag	Kemenkeu, KKP
			Penurunan tarif bea impor untuk alat mesin perikanan dan penunjang industri pengolahan yang belum mampu di produksi di dalam negeri atau sudah di produksi di dalam negeri tetapi belum mencukupi	x	x	x	x	Kemendag	KKP, Kemenkeu, Kemenko Ekon, Kemendag, Kemenperin, BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Operasionalisasi 15 SKPT menjadi Zona Ekonomi Investasi Khusus Kelautan dan Perikanan dalam kerangka Global Value Chain melalui pembentukan kawasan berikat perikanan	x	x	x	x	Kemendag	KKP, BKPM, Kemenperin, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kemenkeu, BUMN, Perbankan, Bea Cukai, Imigrasi,
		Standardisasi Usaha dan Industri Pengolahan Ikan	Permen KP tentang Usaha Pengolahan Ikan	x				KKP	Kemenperin, Pemda, BKPM
			Sertifikasi UPI (SKP), CKIB, dan HACCP.		x	x	x	KKP	Pemda
		Optimalisasi sistem resi gudang untuk produk perikanan, rumput laut, dan garam	Revisi PP No 70/2013 tentang perubahan atas PP 36/2007 tentang pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	x	x			Kemendag	Kemenkumham, KKP, Kemenperin, Kemenkeu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Perpres tentang PSO untuk perusahaan pelabuhan, pengolahan, penyimpanan dan pemasaran di SKPT	x	x			Kemenkeu dan Kemendag	KKP, Kemen BUMN
		Percepatan Industri Rumput Laut Nasional	Perpres tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional	x				Kemenko Ekon	Kemenkumham, KKP, Kemenperin, Kemendag, Pemda
			Revisi Permenkes No. 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi, terkait dengan penyederhanaan persyaratan penempatan apoteker pada industri farmasi berbahan baku rumput laut	x				Kemenkes	Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
			Pembangunan 1 industri non produk pangan berbahan baku rumput			x		Kemenperin dan BKPM	KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			laut untuk pembuatan cangkang kapsul						
		Peningkatan Akses & Konsumsi ikan dalam negeri	Perpres tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	x				KKP	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar), Sekretariat Kabinet (Setkab)
			Pembangunan 5 Model Pasar Ikan Modern		x	x	x	KKP	Kemenko Ekon, Kemendag, Kemen BUMN, Pemda
			Penyediaan 1 Pasar Ikan Bersih untuk ikan segar/olahan/kering per kab/kota	x	x	x	x	Kemendag	KKP, Pemda
		Peningkatan dan perluasan pasar di luar negeri	<i>Letter of Commitment</i> dengan 3 mitra dan 5 Wisma Niaga Ikan Indonesia untuk promosi		x	x	x	KKP dan Kemendag	KKP, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), BKPM, Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			dan <i>branding</i> produk perikanan Indonesia						
		Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Produk Kelautan & Perikanan	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) bagi 20 SNI Produk Perikanan	x	x	x	x	KKP	Kemeperin, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kemenkes
			Perluasan SNI produk mutiara dan ikan hias		x	x		KKP	BNSP
			Penugasan BUMN Perikanan untuk mengembangkan bisnis perikanan di 22 UPT Pelabuhan Perikanan dan 14 UPT Budidaya Perikanan, dan rintisan bisnis di 20 SKPT	x	x	x	x	Kemen BUMN	KKP
			Penugasan BUMN garam untuk pembinaan dan pendampingan kepada Petambak Garam di 40	x	x	x	x	Kemen BUMN	KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			kabupaten penghasil garam rakyat						
4.	Tata Ruang & Pengembangan Kawasan	Transparansi ijin lokasi & ijin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	PP tentang ilin Lokasi dan Ijin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	x	x			KKP	Kemenkumham, Kemendagri
		Percepatan tata ruang laut nasional untuk mendukung keberlanjutan industri perikanan	PP tentang Perencanaan Ruang Laut	x	x			KKP	Kemenkomar, Kemendagri
			PP tentang Tata Ruang Laut Nasional	x	x			KKP	Kemenkomar, Kemendagri
			RTRW dan Rencana Zonasi Daerah untuk 17 Provinsi (31 lokasi SKPT) dan 12 Provinsi Sentra Perikanan Budidaya		x	x		Pemerintah Provinsi	Kemendagri, KKP, Kemenkomar, Kemen ATR/BPN
		Penetapan lokasi dan menyiapkan sarana prasarana Sentra Kelautan dan	Permen KP tentang Penetapan Lokasi SKPT	x	x			KKP	Kemenperin, Kemenkop, Pemda
			Data lingkungan laut untuk 31 SKPT	x	x			BIG	Kementerian Perencanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai Proyek Strategis Nasional							Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
			Peta kawasan skala 1 : 25.000 untuk 31 SKPT	x	x			BIG	KKP, Bappenas, Pemda
			Masterplan 31 SKPT	x	x			KKP	Pemda
			Penetapan SKPT sebagai Proyek Strategis Nasional melalui revisi Lampiran Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Petunjuk Pelaksanaannya	x				Kemenko Ekon	KKP, BNPP
			Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana industri	x	x	x	x	Pemda	Kemendagri, KKP, Kemen ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			perikanan di 31 SKPT						
			Penyediaan jaringan komunikasi di 20 SKPT Kawasan Perbatasan	x	x	x	x	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo)	
5.	Regulasi, Kelembagaan, dan Pembiayaan	Harmonisasi UU Perikanan dengan UU Pelayaran terkait dengan integrasi pengelolaan pelabuhan, syahbandar, gross akte, sertifikasi ABK, pelabuhan sandar kapal pengangkut, penambahan pelabuhan khusus di hub KTI	Harmonisasi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait dengan integrasi pengelolaan pelabuhan, syahbandar, gross akte, sertifikasi ABK, pelabuhan sandar kapal pengangkut, penambahan pelabuhan khusus di hub KTI	x	x			Kemenkumham	KKP, Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Dukungan pembiayaan & akses permodalan : Percepatan pengadaan barang & jasa untuk industri perikanan, penyertaan modal tambahan untuk BUMN Perikanan dan perluasan akses pembiayaan non-APBN untuk bisnis (BLU, KUR, Kredit Perbankan)	Petunjuk Teknis tentang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis Nasional (Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional)	x				Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Kemenko Ekon, Kemenkeu
			Penyertaan modal pada BUMN Perikanan dan BUMN lainnya untuk kegiatan industri perikanan		x	x		Kemenkeu	Kemen BUMN, KKP
			Penyediaan skema pembiayaan khusus melalui Kredit Program dan BLU-LPMUKP	x	x			Kemenkeu	Kemenko Ekon, KKP, Perbankan
			Fasilitasi akses permodalan usaha perikanan melalui Kesepakatan Bersama	x				KKP	Kemenko Ekon, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PJ	INSTANSI TERKAIT
		Perbaikan data & informasi perikanan melalui Satu Data	Penguatan data dan informasi hulu hilir melalui Sistem Satu Data dan sistem e-marketing/bursa ikan	x	x	x	x	KKP	Bea Cukai, Kemenperin, Kemendag, Pemda
		Meningkatkan status kelompok menjadi koperasi	Fasilitasi legalitas kelembagaan usaha untuk 3.000 UKM berbadan hukum bidang perikanan & garam	x	x	x	x	Kemenkop	KKP, Kemenkumham, Kemenkop, Kemen BUMN, BPOM, Pemda
		Minimalisasi risiko keamanan untuk industri perikanan di pulau terluar	Pengamanan kawasan industri perikanan di pulau terluar	x	x	x	x	TNI dan POLRI	Kemenko Polhukam, Kemenkomar, Bakamla, Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit